

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2020. *Dasar-dasar kebijakan publik Edisi Revisi Ke-2*. Bandung:CV. Alfabeta
- Charles O. Jones.1996. *Pengantar Kebijakan Publik. Terjemahan dari buku: An Introduction to The Study of Public Policy*. Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi Offset
- Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Press
- Keban, Yeremias T. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Fitri, Annisa dkk. 2022. *Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanggulangan Bencana Kebakaran Pada Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan*. Universitas Ekasakti, Indonesia
- Hidayat, Agung. (2023). *Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Oleh Sub Urusan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Tanjung, Iqbal. (2020). *Implemtasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Peraturan Bupati Kediri Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Tambahan Tunjangan Pendapatan Pegawai Pemerintah Kabupaten Kediri.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemda